

# STAKEHOLDERS DALAM PARTISIPASI FORUM ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN :

## Peran, Kapasitas, dan Kendala

Sri Yuliani, Rahesli Humsona, Rina H. Haryanti



PTUPT 2017-2018  
Dana Kemenristek Dikti

### ABSTRACT

Forum Anak di Kota Surakarta belum mampu berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara optimal terbukti belum semua Forum Anak mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagai media penyalur aspirasi anak dalam Musrenbang. Pandangan *stakeholders* (perangkat daerah, sekolah, LSM dan organisasi masyarakat) tentang kapasitas anak untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan sangat mempengaruhi dukungan terhadap kebijakan partisipasi anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Untuk itu penting untuk diketahui peran dan kapasitas *stakeholders* dalam mendukung partisipasi Forum Anak Kota Surakarta dalam Musrenbang serta kendala yang dihadapi.

### 1. Partisipasi Forum Anak Kota Surakarta dalam Musrenbang : Kapasitas dan Hambatan

Pada tahun 2015, Forum Anak sudah terbentuk di 51 kelurahan yang ada di Kota Surakarta. Penelitian Yuliani, Haryanti dan Humsona (2017-2018) menyimpulkan Forum Anak di Kota Surakarta belum mampu berperan optimal sebagai media aspirasi atau suara (*voices*) anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dari sisi kapasitas kelembagaan, belum semua Forum Anak mampu menjalankan peran sebagai media penyampai aspirasi anak dalam perencanaan pembangunan. Terbukti belum ada upaya maksimal untuk meningkatkan kegiatan Forum Anak yang terarah dan bersinergi antar kelurahan, kecamatan dan kota. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain:



**Pertama**, belum semua anak paham betul apa fungsi dan peran anak dalam perencanaan pembangunan. **Kedua**, anak kurang percaya diri untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. **Ketiga**, partisipasi anak baru pada tahap kepesertaan, sebatas memberikan usul belum sampai menentukan prioritas. **Keempat**, pendamping partisipasi anak belum menjalankan fungsinya secara optimal. Kebanyakan direkrut dari aparat pemerintah, sudah tua dan kurang memahami psikologi anak muda. **Kelima**, pejabat pemerintah (eksekutif dan legislatif) belum memandang penting partisipasi anak dalam Musrenbang.

## 2. Peran dan Kapasitas Stakeholders

Riset ini mengidentifikasi peran dan kapasitas stakeholders dalam mendukung partisipasi aktif Forum Anak dalam Musrenbang di Kota Surakarta serta faktor kendalanya sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 1. Identifikasi Peran dan Kapasitas Stakeholders dan Faktor Kendala**

No	Stakeholders	Peran dan Kapasitas	Kendala
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas PP, PA dan PM)	<p>Dinas PP, PA dan PM Kota Surakarta telah berperan cukup aktif dalam mendorong partisipasi aktif Forum Anak di tingkat kota atau Forum Anak Surakarta (FAS) dalam Musrenbang di tingkat kota.</p> <p>Dinas PP,PA dan PM kurang maksimal dalam mendorong partisipasi aktif Forum Anak di tingkat kelurahan dan kecamatan</p>	<p>Belum ada kesadaran dan <i>political will</i> untuk sungguh-sungguh melibatkan Forum Anak secara aktif dalam Musrenbang dengan hak suara dan kepentingan yang setara dengan orang dewasa.</p> <p>Masih kuatnya budaya formalisme birokrasi membuat kebijakan partisipasi anak dalam Musrenbang diimplementasikan sejauh memenuhi aturan formal kebijakan.</p>
2	Bappeda	<p>Bappeda berperan cukup aktif dalam mendorong partisipasi Forum Anak di tingkat kota, namun kurang mendorong sinergitas partisipasi anak di semua level Musrenbang.</p> <p>Bappeda telah mengakomodir beberapa usulan FAS, misalnya ide pendidikan sebaya untuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap anak.</p> <p>Namun Bappeda belum mampu mengakomodir usulan Forum Anak dalam Rencana Strategis atau Rencana Kerja holistik dan terintegrasi ke seluruh perangkat daerah.</p>	<p>Belum ada kesadaran dan <i>political will</i> dari Bappeda untuk memprioritaskan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>Masih kuatnya budaya formalisme birokrasi membuat kebijakan partisipasi anak dalam Musrenbang diimplementasikan sejauh memenuhi aturan formal kebijakan.</p>
3	DPRD	<p>DPRD belum memandang penting partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Sejauh ini belum ada kegiatan atau interaksi Forum Anak yang melibatkan DPRD</p>	<p>Belum ada kesadaran dan <i>political will</i> dari DPRD untuk memprioritaskan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>Prioritas utama DPRD masih terfokus pada perencanaan pembangunan fisik atau infrastruktur. Pembangunan kualitas manusia terlebih pemenuhan hak partisipasi anak dalam Musrenbang belum dianggap sebagai prioritas yang mendesak untuk direalisasikan.</p>

4	Dinas Pendidikan	<p>Kegiatan atau program yang melibatkan Dinas Pendidikan adalah upaya mewujudkan perlindungan anak dari tindak kekerasan di sekolah atau Sekolah Ramah Anak.</p> <p>Keterlibatan Dinas Pendidikan dengan Forum Anak terbatas pada implementasi program pendidikan sebaya dalam menekan kekerasan terhadap anak yang disosialisasikan lewat sekolah-sekolah.</p>	<p>Aparatur negara di Dinas Pendidikan dan para guru di sekolah belum semuanya paham tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak atau pengarusutamaan hak anak (PUHA), khususnya partisipasi anak dan peran penting Forum Anak dalam Musrenbang.</p> <p>Fokus Dinas Pendidikan dan para guru pada tugas pokok terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah sehingga sosialisasi hak anak di lingkungan sekolah belum dianggap sebagai hal yang urgent.</p>
5	Pembina Forum Anak	<p>Pendamping bertanggungjawab memberdayakan Forum Anak agar mampu menyusun perencanaan secara kolektif sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, serta mampu membangkitkan motivasi dan kesadaran diri yang inovatif disesuaikan dengan kebutuhan anak.</p> <p>Dalam kenyataan banyak pendamping yang masih memiliki keterbatasan pemahaman yang benar tentang hak anak maupun partisipasi anak. Oleh karenanya penguatan kapasitas bukan saja penting bagi kelompok anak tapi juga untuk para pendamping.</p>	<p>Pembina Forum Anak direkrut dari aparat sipil negara/PNS yang kebanyakan kurang paham tentang pengarusutamaan hak anak, khususnya hak partisipasi anak dan pentingnya partisipasi Forum Anak dalam Musrenbang.</p> <p>Sebagian besar pembina sudah disibukkan dengan tugas pokok mereka di instansi/OPD mereka sehingga kurang intens dalam mendampingi Forum Anak</p> <p>Kebanyakan sudah berumur sehingga kurang bisa memahami jiwa, semangat dan psikologi anak muda karena itu kurang bisa menyelami apa yang menjadi kebutuhan atau kepentingan anak muda.</p>
6	LSM	<p>Ada beberapa LSM yang terlibat dalam penguatan kapasitas Forum Anak a.l yayasan KAKAK, SPEKHAM dan Sahabat Kapas.</p> <p>Yayasan Kakak telah terlibat aktif dalam penguatan kapasitas Forum Anak sejak Forum Anak belum dilegalisir kelembagaannya oleh Pemerintah Kota Surakarta sampai sekarang.</p> <p>LSM memiliki kapasitas yang cukup untuk melatih Forum Anak melakukan analisis potensi, permasalahan dan menentukan prioritas yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas</p>	<p>LSM memiliki dana yang terbatas untuk melakukan penguatan kapasitas Forum Anak</p>

		anak dalam merumuskan masalah dan memilih solusi atau usulan kebijakan.	
7	Organisasi Masyarakat	<p>Organisasi masyarakat di tingkat terbawah seperti RT, RW, Karang Taruna dan PKK berperan penting dalam rekrutmen pengurus dan anggota Forum Anak karena RT, RW, PKK dan Karang Taruna yang paling tahu siapa yang berkompeten untuk aktif berkegiatan di Forum Anak dan permasalahan anak yang urgent untuk diusulkan dalam Musrenbang.</p> <p>Rekrutmen keanggotaan Forum Anak selama ini banyak direkrut dari anak para pengurus kelembagaan organisasi kampung dan kelurahan. Cara rekrutmen ini ditempuh selain karena prosesnya cepat, juga karena Forum Anak di tingkat kelurahan dan kecamatan sifatnya wajib atau untuk memenuhi tuntutan peraturan .</p>	Belum semua kelembagaan masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pengarusutamaan hak anak dan peran penting Forum Anak dalam Musrenbang.
	Orang tua	<p>Keluarga merupakan wahana pertama dan utama untuk memberikan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.</p> <p>Kebanyakan orang tua dari anggota Forum Anak aktif dalam kepengurusan organisasi wilayah atau bekerja sebagai guru atau aparat sipil negara/PNS. Para orang tua mendukung anak-anaknya untuk terlibat dalam Forum Anak karena berpandangan aktif di Forum Anak memberi dampak positif pada anak seperti pengalaman berorganisasi, belajar bertanggungjawab, disiplin, dan berani tampil di muka umum.</p>	<p>Belum banyak orang tua yang tahu tentang keberadaan Forum Anak dan peran pentingnya dalam perencanaan pembangunan.</p> <p>Masih ada sebagian orang tua yang lebih suka anaknya konsentrasi pada kegiatan akademis (sekolah). Terlibat dalam Forum Anak dianggap dapat mengganggu jadwal kegiatan sekolah anak.</p>
	Dunia usaha/swasta	<p>Dunia usaha punya potensi peran besar sebagai penyokong dana atau bantuan material maupun non material untuk mendukung program partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.</p> <p>Sejauh ini dunia usaha belum banyak dilibatkan dalam mendukung partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.</p>	Belum ada upaya sosialisasi ke kalangan pelaku bisnis tentang pentingnya anak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yang berdampak bagi kepentingan anak, sehingga pelaku bisnis tidak tahu relevansi dunia bisnis dengan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan

Sumber : diolah dari wawancara dan FGD dengan informan

### 3. Pilihan Kebijakan

Untuk meningkatkan kapasitas *stakeholders* agar mampu mendukung partisipasi aktif Forum Anak di Kota Surakarta dalam Musrenbang, riset ini menawarkan pilihan kebijakan sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada *stakeholders* tentang pentingnya partisipasi aktif anak dalam Musrenbang.

**Manfaat** : kesadaran *stakeholders* akan hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan akan berimplikasi pada komitmen untuk melibatkan anak dalam keputusan publik dan mengakomodir suara dan kepentingan anak dalam program-program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan anak.

**Kendala** : kesadaran cenderung lebih mudah diaplikasikan ke orang tua/keluarga dan organisasi di level masyarakat, tapi akan sulit dilakukan bagi *stakeholders* dari kelembagaan pemerintah (perangkat daerah dan DPRD) terutama para pemegang jabatan strategis.

2. Mengintegrasikan hak anak (pengarusutamaan hak anak) dalam proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan daerah.

**Manfaat** : pengarusutamaan hak anak akan dapat mengintegrasikan kepentingan anak dalam rencana dan manajemen strategis seluruh dinas daerah, sehingga hak-hak anak dapat dipenuhi secara integral dan holistik.

**Kendala** : Kepentingan anak sesungguhnya sudah diakomodir dalam perumusan renstra daerah yakni dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) dan Rencana Aksi Kota Layak Anak (RAD-KLA), namun kedua rencana aksi ini belum terintegrasi satu sama lain. Di tataran implementasi, kedua rencana aksi belum efektif karena kecenderungan budaya

birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan atau program sekedar memenuhi legalitas dan formalisme.

3. Meningkatkan kapasitas melakukan analisis situasi dan potensi serta identifikasi kebutuhan anak bagi anggota Forum Anak maupun aparat dinas daerah.

**Manfaat** : kemampuan melakukan analisis situasi dan kebutuhan sangat membantu Forum Anak dalam menyampaikan usulan dalam Musrenbang, sedangkan bagi aparat sangat membantu dalam merumuskan isu strategis anak secara holistik dan komprehensif.

**Kendala** : belum semua Forum Anak mendapatkan pelatihan analisis potensi dan kebutuhan. Adapun aparatur dan pejabat daerah selama ini menyerahkan tugas menyusun rencana strategis atau rencana aksi daerah pada tenaga ahli dari perguruan tinggi sehingga mereka tidak memiliki wawasan yang cukup tentang dunia dan kebutuhan anak.

4. Melibatkan partisipasi pendidikan tinggi dan LSM dalam penyadaran pentingnya hak anak dan penguatan kapasitas *stakeholders*

**Manfaat** : tenaga ahli dari perguruan tinggi berkontribusi bagi pemikiran konseptual dan strategis sedangkan LSM memiliki kompetensi praktis dan aplikatif. Kedua bentuk kompetensi ini sama-sama dibutuhkan untuk mendukung penguatan kapasitas Forum Anak maupun aparat perangkat daerah.

**Kendala** : perbedaan perspektif antara perguruan tinggi dan LSM dalam memahami permasalahan sosial berpotensi menghambat sinergitas dalam penguatan kapasitas Forum Anak

## 4. Rekomendasi

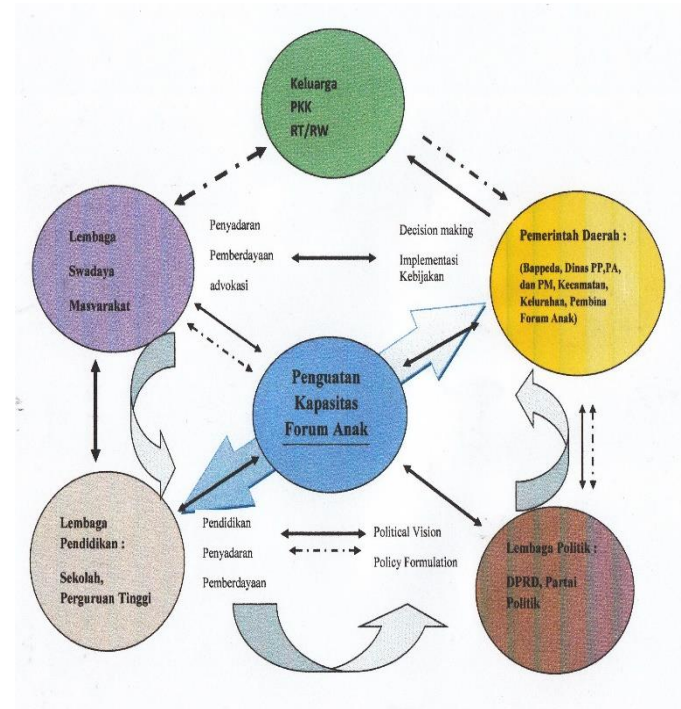
Mempertimbangkan manfaat dan kendala dari alternatif kebijakan sebagaimana dirumuskan dalam pilihan kebijakan, maka langkah yang bisa dilakukan adalah :

1. Mengingat partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal maka model pengembangan kapasitas anak yang tepat adalah strategi pengembangan kapasitas Forum Anak berbasis *Collaborative Governance* antar institusi. Institusi pemerintah dalam *Collaborative Governance* berperan penting sebagai koordinator dan fasilitator untuk menggerakkan kolaborasi antar *stakeholders* sehingga masing-masing *stakeholders* dengan fungsi dan kompetensi masing-masing bisa saling mengisi, saling menguatkan dan bersinergi bersama untuk menguatkan kapasitas Forum Anak dalam berpartisipasi aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

2. Untuk mengembangkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan perlu dibangun fondasinya yaitu penguatan kapasitas anak untuk bisa menyuarakan aspirasinya dalam forum perencanaan pembangunan, dan ini hanya bisa tercapai jika ada kesadaran dan penguatan kapasitas *stakeholders* dalam partisipasi anak, terutama orang tua, masyarakat sipil (sekolah, pembina Forum Anak, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat/LSM) , dan negara (Legislatif dan OPD terkait). Mengingat kesadaran di kalangan pejabat eksekutif dan legislatif tidak mudah untuk diimplementasikan, maka langkah paling efektif adalah dengan mengembangkan kesadaran akan hak-hak anak dan

pelatihan penguatan kapasitas di kalangan Forum Anak melalui pendekatan pendidikan sebaya (*peer education*). Cara ini selain dapat menghemat anggaran juga memberdayakan anak, karena beberapa anak (terutama Ketua Forum Anak) yang telah mendapatkan penyadaran dan pelatihan dapat mentransfer pengetahuan kepada anak-anak lainnya

Riset ini merekomendasikan Model Penguatan Kapasitas Stakeholder Berbasis *Collaborative Governance* untuk Mendukung Partisipasi Aktif Forum Anak Dalam Perencanaan Pembangunan



Profil Peneliti :

**Dra. Sri Yuliani, M.Si** adalah Pengajar di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan peminatan riset pada isu gender dan politik identitas dalam manajemen dan kebijakan publik.

**Dra. Rahesli Humsona, M.Si** adalah Pengajar di Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan peminatan riset pada isu gender dan patologi sosial

**Dr. Rina Herlina Haryanti, M.Si** adalah Pengajar di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan peminatan riset pada isu gender dan hak difabel dalam manajemen dan kebijakan publik.

**Referensi :**

- Yuliani, Sri., Haryanti, Rina Herlina, dan Humsona, Rahesli. 2015-2016. Strategi Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Forum Anak Surakarta Untuk Meningkatkan partisipasi Aktif Anak Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan . *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi*.
- Yuliani, Sri., Haryanti, Rina Herlina, dan Humsona, Rahesli. 2017-2018. Strategi Pengembangan Kapasitas *Stakeholders* Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Forum Anak Surakarta Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. *Laporan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi*.

